

## Tatkala Kampung Kota Bicara Konflik-Harmonisasi

*Pratiwi, Niken B. Pratiwi, Tiara Elgifienda.<sup>1</sup>*

### **Abstract**

*Suburban becomes a marginal community as the result of government's construction and society based on government's developing program. These research explain the effect of disparity development. And it creates the victim, which is the rural city. The delayed of development become worse when the conflict is in the rural city. Collectivism and tolerance of interaction in rural city, and it lost when the individualism in the society. Godeireng's citizen as known as beggar, and vagrant and it bring the negative perspective. The conflict caused disintegration. By the time and the effort of youth, the citizen propose the development program for all. It is the start of harmonization process to build a better rural.*

*Key words: suburban, city, conflict, harmonization*

### **Pendahuluan**

Perbedaan etnis dan agama bukanlah satu-satunya faktor pemicu disintegrasi bangsa. Perbedaan identitas hanya menjadi variabel *intervening* terjadinya konflik.<sup>2</sup> Konflik karena ketimpangan penguasaan sum-

---

<sup>1</sup> Pratiwi, Niken B. Pratiwi, Tiara Elgifienda adalah mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fisipol Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Syamsul Hadi, dkk. (2006). *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 272.

ber daya alam dan pembangunan yang terjadi di Aceh, Papua dan Maluku tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu dampak dari pendekatan pembangunan yang sentralistik. Tulisan ini hendak menunjukkan salah satu manifesto konflik yang diiris dari sebuah teritori pinggir kota yang disebut perkampungan. Konstruksi pembangunan di pusat-pusat kota menjadikan lokasi pinggir tidak banyak disentuh. Konflik yang terjadi pada *setting* penelitian ini juga disebabkan ketimpangan penguasaan sumber daya pembangunan.

Di pinggir Kota Yogyakarta, beberapa kilometer arah tenggara dari alun-alun selatan, terdapat sebuah kampung bernama Godeireng. Kampung ini terkenal sebagai kampung hitam yang menjadi tempat tinggal para preman, pengamen, pengemis, dan sejumlah pekerja sektor informal lainnya. Kantong-kantong kemiskinan bantaran sungai dan pinggir kota Yogyakarta memang banyak terjadi fenomena kampung hitam layaknya Godeireng namun, hanya kaum miskin kota yang tinggal di Godeireng telah diinstitutionalkan sejak 1901. Selain itu, konflik yang ada di kampung ini tidak datang secara tiba-tiba. Munculnya konflik di RW 11 dan 12 melibatkan pelbagai aktor dan elemen sosial didalamnya.

Secara geografis, Godeireng terletak di bantaran sungai Code. Sekitar satu kilometer dari pojok beteng kraton sebelah timur. Kampung ini terbagi dalam dua RW yaitu RW 11 dan 12. RW 12 merupakan pemukiman *wong kulon* terletak di daerah atas dan lebih dekat dengan jalan raya. Sedangkan RW 11 yang menjadi pemukiman *wong wetan* posisinya di bawah dan lebih dekat dengan sungai Code. Di kampung ini, *wong kulon* dan *wong wetan* sudah lama tersegregasi. *Wong kulon* kebanyakan adalah masyarakat golongan atas yang berprofesi sebagai pegawai, pensiunan dan pengusaha. *Wong wetan* merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai tukang becak, buruh serabutan, pemulung, pedagang kaki lima, pencopet, pengemis, pengamen, dan preman. Secara ekonomi, sebagian dari mereka juga ada yang kondisinya setara dengan *wong kulon*.

Perbedaan mata pencaharian, kondisi ekonomi, dan faktor sejarah semakin menegaskan perbedaan dua golongan di kampung Godeireng. Adanya anggapan bahwa *wong kulon* adalah orang asing bagi *wong wetan* dan sebaliknya, kritikan yang bermuansa sinis, serta rasa saling curiga, menyebabkan perbedaan ini kemudian bermuara pada terjadinya

konflik. Penyajian tulisan ini bertujuan mengeksplorasi dinamika konflik di Kampung Godeireng sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian tentang bagaimana proses harmonisasi masyarakat Godeireng terjadi mengingat segregasi sosial telah berlangsung dalam sejarahnya yang panjang?

### **Kampung: Fenomena Tidak Terhindarkan Sebuah Kota**

Kota terbentuk karena dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan. Sebagaimana yang diungkapkan Alan Gilbert dan Josef Gugler bahwa kota merupakan pusat kekuasaan dan hak-hak istimewa.<sup>3</sup> Bagi pihak-pihak yang tidak terartikulasikan kepentingannya oleh kuasa pusat akhirnya terpinggirkan. Mereka tinggal di sebuah pinggiran yang disebut kampung.

Identifikasi kampung tergantung pada kapan waktu dan siapa yang mengaplikasikan. Berkenaan dengan kampung yang ada di Indonesia, kata kampung dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis lingkungan sebagai tempat tinggal. Kampung yang terdiri dari jajaran tempat tinggal sederhana menjadi sebuah area desa (*village*) yang terletak di lingkungan perkotaan atau sebuah unit administrasi. Kampung kota juga dapat didefinisikan sebagai daerah teritorial yang dihuni oleh komunitas yang menginterpretasikan kehidupan kota tetapi masih memegang teguh pola-pola dari desa yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut misalnya memiliki sub-standar hidup dan penduduknya hampir eksklusif dengan budaya dan tradisi konservatif.<sup>4</sup> Sub-standar ini merupakan gaya hidup kaum urban yang tidak dapat mengikuti imaji kemewahan pusat kota. Dengan kata lain, kampung ada karena ketimpangan sumber daya kekuasaan ekonomi dan administratif terhadap pusat kota.

Kajian tentang dinamika kampung di perkotaan menarik untuk dijadikan *best practice* terutama bagi fenomena konflik karena perbedaan sumber daya antara dikotomi pinggiran-pusat. Meskipun kampung jauh dari akses kekuasaan formal, hampir dalam setiap dinamika konfliknya merupakan efek domino dari kebijakan kekuasaan formal. Efek tersebut

---

<sup>3</sup> Alan Gilbert dan Josef Gugler. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 55

<sup>4</sup> Gerald H. Krausce. (1975). *The Kampung Of Jakarta, Indonesia: Study of Spatial Pattern in Urban Poverty*. Pittsburgh, University of Pittsburg. Hlm.31-35.

sering kali bersifat negatif yang pada akhirnya merugikan masyarakat kampung itu sendiri.

Hubungan *vis a vis* antara kampung dan otoriternya kekuasaan pusat kadang tidak terhindarkan lagi. Kekerasan di perkotaan menjadi lumrah dalam melegalkan kekuasaan. Meskipun begitu, pedagang yang paling miskin pun menyatakan bahwa kehidupan mereka lebih baik dari pada mereka yang tinggal di pedesaan.<sup>5</sup>

### **Mengenal Identitas Masyarakat Kampung Godeireng**

Identitas merupakan ciri khas yang melekat pada seseorang, kelompok, komunitas atau kekuasaan. Seseorang dikenal tatkala identitas yang khas itu melekat dalam dirinya. Artinya dengan mengenal identitas kita dapat merumuskan banyak hal, salah satunya adalah strategi ketika saling berhadapan. Oleh karena itu, mengenal identitas Godeireng sangatlah penting untuk memulai suatu analisa konflik.

Pemandangan yang dapat dilihat ketika memasuki Kampung Godeireng adalah lorong-lorong sempit dan rumah-rumah hunian warga yang tidak beraturan. Masyarakat yang ada di daerah ini pada awalnya adalah para gelandangan Kota Yogyakarta yang dibina dan dipusatkan oleh departemen sosial. Pada 1945, departemen sosial menjamin hidup mereka dan membekalinya dengan keterampilan untuk dapat hidup mandiri dan lebih baik.

Terpilihnya Godeireng sebagai area pembinaan bagi orang terlantar dan gelandangan merupakan keputusan resmi dari pemerintah. Petugas maupun relawan yang memberikan pendampingan kepada mereka adalah orang-orang yang berstatus PNS. Penampungan ini berbentuk asrama yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu penampungan untuk orang-orang yang dibina yang disebut komplek Sidoarum dan komplek untuk para pengurus asrama atau yang disebut komplek Girirejo. Dalam usaha penampungan ini, pemerintah juga melibatkan militer untuk menertibkan. Dari sinilah kompleks Sidoarum-Girirejo dipakai juga untuk menyebut kampung Godeireng.

Hunian yang ditempati oleh para pengurus asrama menjadi semakin meningkat. Berdasarkan tingkat pekerjaan dan pendapatan, mayori-

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 56.

tas adalah warga yang memiliki kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Begitu juga dengan hunian yang dulunya ditempati oleh gelandangan atau orang-orang yang dibina semakin beragam, tetapi mereka juga berada dalam kondisi sosial-ekonomi menengah ke bawah dan rata-rata berkerja pada sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, pencopet, dan sebagainya.

Selanjutnya badan pembinaan ini mengalami kebangkrutan pada 1967. Kegiatan yang tersisa hanya pembinaan mental dan akhlak melalui dakwah dan pengajian. Godeireng sebagai penampungan tunakarya dan tuna wisma pada awalnya memiliki citra yang sama seperti kampung-kampung lain.

Pasca tragedi G 30 S/ PKI banyak preman-preman kota yang masuk ke Godeireng. Pada masa ini, kampung Godeireng mulai dikenal sebagai kampung hitam, karena para pelaku kriminal banyak masuk kedalamnya. Pada tahun 1976 Asrama ini resmi ditutup, para penghuni asrama maupun para pengurus diperbolehkan untuk tetap tinggal di Godeireng, asalkan mencari hidup sendiri.

Setelah pengelola asrama bangkrut, status "penghuni penampungan" berubah menjadi "penduduk" yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>6</sup> Kemudian dibentuklah Rukun Kampung (RK). Diantara penduduk mulai terbentuk semacam stratifikasi sosial antara *wong kulon* dan *wong wetan*. Stratifikasi yang terbentuk pun memicu sejumlah konflik.

Konflik di Godeireng tidak hanya terjadi karena segregasi sosial dan ekonomi saja, tapi juga antar agama. Konflik antar agama yang terjadi dalam bentuk manifest. RW 11 cenderung menganut ajaran Muhammadiyah dan RW 12 menganut paham Nahdatul Ulama (NU).

### **Dinamika Konflik dan Pelabelan Kelas**

Konflik merupakan benturan antara dua kepentingan yang berbeda, yang menciptakan kondisi yang saling bersaing, saling menghindar antara dua pihak. Definisi ini kemudian diperkuat oleh Webster (1966),

---

<sup>6</sup> Muhammad Zamzam Fauzanafi. (2003) 'Sejarah Institusionalisasi Kampung Tungkak'. *Jurnal Kampung Menulis Kota, edisi Kota Kampung Kota*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pondok Rakyat. Hlm. 116.

konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” – yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, cara, dan lain-lain”. Secara singkat istilah konflik kemudian menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.<sup>7</sup>

Untuk memetakan jenis konflik di Godeireng dapat menggunakan konsep konflik vertikal. Ralf Dahrendorf, teoritis konflik mazhab fungsionalisme membagi konflik dalam dua jenis yakni konflik manifes dan konflik tertinggi. Konflik manifes berwujud sikap penolakan yang lemah, dapat berupa selentingan, atau lebeling terhadap pihak yang bertentangan. Sedangkan konflik tertinggi merupakan konflik yang berindikasi kekerasan karena terlampaui hebatnya konflik.

Isu yang berkembang antara kedua RW di Godeireng pasca pemecahan, yakni saling melabelkan dapat dikatakan sebagai konflik manifes di antara penduduk kedua RW. Dikotomi lahir sejak penamaan kampung ini dengan nama Sidoarum-Girirejo. Ungkapan-ungkapan yang saling bertentangan termanifestasi antara *wong kulon* terhadap *wong wetan*, seperti “kurang bisa diajak mikir, miskin materi, miskin ilmu, miskin moral dan agama. Sedangkan *wong wetan* terhadap *wong kulon*, seperti anggapan “sok-sok an”.

Identitas “kekitaan” Godeireng dan hubungan positif yang saling menguntungkan antara yang membina dan yang dibina pun tersamarkan oleh “kekamian”. Kekitaan itu masih harus digerus lagi dengan keakuan antar individu yang ditandai dengan slogan *sopo siro, sopo ingsun* (siapa saya, siapa anda). Label-label tersebut menjadi salah satu indikasi konflik dan keterasingan satu sama lain karena label-label kelas itu bersifat negatif yang merusak kepercayaan di antara mereka. Sehingga, kerjasama tidak dapat dijalin dengan baik jika masih terdapat isu sentimen saling menjelekan yang berhembus di antara kedua kampung.

Selain konflik manifes, konflik tertinggi juga mewarnai kampung ini pada 1980-an. Konflik ini berakar ketika susunan administrasi kampung Godeireng yang dulunya tergabung dalam sebuah Rukun Kampung (RK) dipecah menjadi Rukun Warga (RW) oleh pemerintah orde

<sup>7</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9.

baru. Bentuk pemisahan administratif ini semakin memicu perpecahan. Di satu sisi, pemisahan administratif dapat memudahkan pendataan maupun identifikasi penduduk. Di sisi lain, jika masyarakatnya belum siap dalam pemisahan administrasi, justru menimbulkan persaingan untuk menjadi yang terbaik. Di dalam persaingan ini tidak jarang terjadi konflik. Kekerasan yang terjadi saat itu dapat dipacu hal-hal kecil seperti cara pandang individu yang bersifat subjektif dan cara penyebutan nama. Kondisi konflik makin parah tatkala pertikaian antar partai pada pemilu 1982. Pada waktu itu, massa di kedua kampung digunakan oleh partai-partai yang berbeda. Penggerakan ini justru bermuara pada kekerasan antara kedua kampung karena partai-partai yang menggerakan mereka pun sangat bertentangan.

Fenomena kekerasan di Godeireng terjadi juga ketika pemerintah mengadakan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) pada tahun 1980-an. Ini dilakukan pemerintah untuk merepresi kriminalitas kota dengan menangkap pelaku-pelaku kriminal di kantong-kantongnya. Sebagai kantong kriminal isu penembakan misterius (petrus) merebak pula di daerah tersebut. Orang-orang yang diduga preman dan mengancam ketertiban diselesaikan dengan cara-cara kekerasan.

Secara sosiologis dan psikologis, masyarakat kampung Godeireng sangat sensitif untuk terlibat konflik bahkan melakukan tindak kekerasan. Pencitraan orang-orang Godeireng setelah ditempati oleh anak-anak preman terkenal sebagai orang-orang yang kasar. Dalam wawancara dengan kami, Ketua Pelaksana CDP mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dulu mungkin kelompok *wong kulon* dan *wong wetan* tidak berani saling bertemu karena *wong kulon* takut menyapa. Jika salah menyapa, maka nyawa menjadi taruhan”<sup>8</sup>

Meski OPK berakibat pada sejumlah kasus kekerasan, namun program ini terbukti dapat menertibkan kampung Godeireng. Saat itu ada upaya dari pemerintah untuk memberantas kejahatan. Efek ini be-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ketua Pelaksana Community Development Program (CDP), 19 November 2008, pukul 13.15 WIB

rimbas pada penduduk, di mana banyak yang melarikan diri lantaran takut mendapatkan sanksi yang berat.

Selama OPK, *wong kulon* dan *wong wetan*, maupun preman-preman yang saat itu berdomisili di Godeireng seperti memiliki musuh bersama, karena hampir setiap rumah tidak terlepas dari penggeledahan senjata tajam, berdasarkan pengakuan dari seorang saksi, semua senjata tajam dari pisau dapur sampai per becak dirampas. Menurut salah seorang informan yang sejak kecil tinggal di daerah RW 11 menyebutkan

“Polisi dulu mengontrol penempatan orang-orang terlarang dan gelandangan di sini agar mereka tidak melarikan diri. Gelandangan kebanyakan malu dipindah ke kampung ini, banyak yang menutupi mukanya dan mencoba kabur, tapi lalu ditembakkan senapan ke atas untuk menakut-nakuti agar tidak lari...”<sup>9</sup>

Senada dengan informan tersebut, Ketua Pelaksana CDP juga menyatakan;

“Terus terang dengan adanya OPK secara otomatis mereka yang berdomisili, mau tidak mau harus berani melebur ke masyarakat.”<sup>10</sup>

Berbeda dengan konflik kekerasan antara ormas dan partai pada 1980-an dan 1990-an. Pada 2006, tepatnya pasca terjadi gempa jogja, konflik tertinggi turun menjadi konflik manifes. Robohnya rumah memerlukan dana pembangunan yang besar. Kedekatan masyarakat kampung dengan salah satu LSM memudahkan mereka membangun kampung baru dengan konsep yang baru secara bersama-sama, antara *wong kulon* dan *wong wetan*. LSM ini kemudian memfasilitasi proses pembangunan yang didanai sebuah lembaga donor asal Jerman. Kebersamaan kedua kelompok berkonflik menjadi syarat pengucuran dana dari lembaga donor. Meski demikian, program yang dijalankan di setiap RW berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan prasangka subjektif di salah satu pengurus RW 12. Seperti apa yang diungkapkan Ketua RW 12 berikut ini;

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan warga, 25 November 2009, pukul 09.30 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua Pelaksana CDP, 19 November 2008, pukul 13.20 WIB.

“Kami juga mengonsep pembangunan dengan pemisahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) agar berkembang. Ada forum komunitas code selatan pada 2004 yang difasilitasi Bapedalda. Kami berupaya agar sampah dapat diolah dan kami *sharing* dengan penduduk Dukunan. Setelah itu, kami dapat dana dari Jerman, untuk merealisasikan konsep RW kami. Kami punya mesin pengolah sampah Ini salah satunya yang tidak dimiliki 11. *Nuwun sewu ya*, kalau RW 11 itu kreativitasnya kurang ada. Jika ada bantuan, setelah realisasi, programnya juga selesai. Kalau penduduk RW 12 sebisa mungkin memanfaatkan bantuan ke depan. Tidak hanya bermanfaat untuk laporan tapi betul-betul banyak manfaat. Dalam info kota ada OPGK Brontokusuman itu kami juara tiga propinsi. Salah satunya dari RW 12 yang mewakili kota. Kami menang juara satu.”<sup>11</sup>

Jika ditinjau secara holistik, konflik yang menimpa Godeireng sebagian besar disebabkan oleh sistem yang lebih besar, baik pemerintah, partai, maupun organisasi masyarakat. Jika dilihat dari awal pendirian penampungan kaum miskin penderita lepra oleh Zending, lembaga Belanda, pada 1901 lalu kaum gelandangan yang dibina semakin terdiktomi dengan adanya yang membina pada 1960-an dengan dibangunnya asrama gelandangan. Sehingga, dari sini mulai muncul konflik manifes. Menyusul 1980 konflik antar partai dan kekerasan oleh OPK terhadap warga hingga konflik manifes karena perbedaan ideologi ormas antara warga yang menganut NU dan Muhammadiyah. Hingga pada 2006 masih bersisa konflik manifes berupa sentiment negatif saat pembangunan pasca gempa.

### **Proses Harmonisasi dan Aktor-aktornya**

Proses harmonisasi warga diawali pada dan pasca OPK. Aktor-aktor yang mengontrol konflik saat itu tidak hanya dari aparat pemerintah, tapi juga penduduk setempat yang memiliki strata tertentu yang lebih

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ketua RW 12, 12 November 2008, pukul 16. 20 WIB.

tinggi, seperti status pendidikan, kekayaan, dan jabatan. Terdapat beberapa orang yang memiliki fungsi legitimasi tersebut antara lain warga baru yang beradaptasi dan berinisiatif mengadakan acara bersama serta Ketua RW 12 Godeireng. Warga baru yang beradaptasi dan mengadakan acara pengajian bersama tersebut merupakan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) datang ke Godeireng pada tahun 1970-an. Pada waktu itu, Godeireng sering menjadi sasaran razia preman dari aparat kepolisian hingga membuat penduduk setempat ketakutan. Ia kemudian merasa terpanggil untuk “membina” penduduk agar tidak banyak yang menjadi preman. “Pembinaan” itu dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga dan pengajian. Awalnya, warga merasa sungkan untuk bergabung dalam pengajian, namun hanya mendengarkan di luar, lama-kelamaan beberapa orang mulai bergabung.<sup>12</sup>

Selain warga pendatang tersebut, ada pula Ketua RW 12 yang juga sebagai Ketua Gerakan Code Selatan (GCS). Sarjana hukum ini sering memelopori pembangunan di daerah code selatan termasuk beberapa RW di Godeireng. Ia juga yang menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki kondisi kampung tersebut. Langkah yang dilakukannya lebih kearah pembangunan dan penataan kampung secara fisik dan non fisik. Pembangunan yang ia laksanakan ini telah berwujud penataan pinggir code selatan yang dahulunya dijadikan tempat pembuangan sampah sekitar, menjadi jalan *paving block*. Jalan tersebut juga disertai pepohonan di pinggirannya sebagai penghijauan. Untuk pembangunan non fisik ia mulai dengan mendukung kegiatan pengajian di kampung tersebut. Ketua RW 12 juga tidak menafikan sikap defensif dari *wong wetan* terkait peran aktifnya dalam pembangunan tersebut.

“Bagaimanapun kondisinya, harus pintar-pintar pendekatan ke masyarakat (*wong wetan*) yang belum paham. Memang banyak juga warga yang berpartisipasi tapi kalau salah pendekatannya saya bisa dituduh menjual kampung ini untuk keuntungan pribadi. Padahal ini untuk penataan kampung tapi itu sayangnya setelah dibangun fasilitas, yang belakang-belakang (*wong wetan*) tidak ada yang merawat....”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Op. cit.* Muhammad Zamzam Fauzannati, hlm 71.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ketua RW 12, 12 November 2008, pukul 16. 20 WIB.

Tidak hanya oleh warga pendatang yang mampu beradaptasi dan Ketua RW 12 saja, masyarakat kampung Godeireng juga dikonstruksikan oleh pemerintah sebagai masyarakat yang perlu dibenarkan, disembuhkan penyakitnya dan diberdayakan. Dalam penelitian ini, terungkap bahwa proses integrasi yang ada di Kampung Godeireng mirip dengan konsep negara bangsa modern, dimana terdapat institusi dan otoritas yang membuat mereka tergabung dan melaksanakan pembangunan secara bersama-sama, khususnya dalam memperbaiki citra kampung menjadi kampung yang lebih baik.

### Strategi Masyarakat Meredam konflik

Maurice Duverger menyatakan bahwa konflik dan integrasi bukan melulu sebagai dua aspek yang kotrakdiktif.<sup>14</sup> Banyak yang berpendapat bahwa konflik dan integrasi bukanlah hal yang berlawanan, akan tetapi menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses umum yang sama. Konflik cenderung menuju integrasi, dan antagonisme dalam perkembangannya akan menuju ke arah menghapus dirinya sendiri (*self elimination*) yang selanjutnya menghasilkan harmoni sosial. Konflik dan integrasi merupakan dua aspek saling melengkapi satu sama lain. Paham integrasi kemudian memainkan peran penting, justru di dalam perkembangan konflik itu sendiri.

Saat penelitian ini dilaksanakan, konflik-konflik yang terjadi antar RW mulai memudar. Label-label *wong kulon* dan *wong wetan* mulai dilupakan oleh warga. Hampir semua informan yang kami temui mengatakan bahwa *wong kulon* dan *wong wetan* sudah tidak ada lagi, artinya mereka mencoba untuk tidak mengingat hal itu lagi

“...ini tinggal lembaran-lembaran sejarah, tidak mungkin kami hapuskan, tapi tidak perlu kami munculkan. Masyarakat sudah melupakan. Dalam komunitas sehari-hari mereka sudah melupakan, mereka sudah hapus dalam ingatannya, sehingga dalam kehidupan kerukunan yang cukup tinggi, luar biasa perbedaannya daripada dulu yang mungkin kelompok orang depan

---

<sup>14</sup> Maurice Duverger (2007). *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 251-252.

dan orang belakang tidak berani saling bertemu.”<sup>15</sup>

Begitulah pengakuan Ketua Pelaksana CDP, atas konflik antara wong kulon dan wong wetan yang pernah terjadi. Hal tersebut dapat kita artikan sebagai upaya perdamaian pasif dari warga masyarakat, dimana mereka mencoba untuk melupakan dan tidak mengorek ketegangan-ketegangan yang pernah terjadi, namun mereka masih enggan untuk menceritakan apa yang pernah terjadi dengan *wong kulon* dan *wong wetan*.

Konflik antar komunitas juga mereda di kalangan pemuda. Seorang anggota Karang Taruna RW 11, mengatakan konflik antara bapak-bapak masih sering terjadi. Mereka sering mendengar selentingan-selentingan *wong kulon* dan *wong wetan* sekitar awal tahun 2000-an, tapi kini sudah tidak ada lagi. Mereka sendiri menganggap itu hanya urusan bapak-bapak, tapi mereka memiliki kehidupan yang berbeda yang tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep *wong kulon* dan *wong wetan*. Artinya proses-proses labeling tidak lagi direproduksi ke dalam kehidupan generasi pemuda yang sekarang.

“Kami ingin mengubah citra kampung. Jika dulu orang mengatakan ini kampung hitam. Kesan yang muncul terhadap kampung ini pasti ini tempatnya orang kelas bawah dan kriminal, karena isinya hampir sama, dari status sosial mereka, profesinya ada pengamen, pengemis, pencopet. Dari kesan itu, teman-teman muda memiliki ide kerja bersama agar dapat mengubah citra kampung ini, setidaknya orang tidak terus memandang negatif. Alhamdulillah, kerja bersama kami itu namanya ‘kampung masa depan kota’”<sup>16</sup>

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari pemuda RW 12 yang mengamini pernyataan pemuda RW 11. Dalam citra kampung yang negatif, ternyata terdapat usaha positif dari semua kalangan untuk memperbaiki citra kampung dan memperbaiki lingkungan hidup. Pembangunan itu tidak terlepas dari persoalan sumberdaya. Melalui pembangunan inilah kerjasama (integrasi) antar dua RW tersebut teruji dan terbukti.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ketua Pelaksana CDP, 19 November 2008 pukul 13. 25 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan salah seorang pemuda RW 12, 8 September 2008 pukul 14. 00 WIB.

Salah satu sumberdaya yang berbeda dan mewarnai pelabelan partisipasi pembangunan Kampung Godeireng adalah tata ruang kampung. *Wong kulon*, istilah ini mengacu pada posisi pemukiman yang dekat dengan jalan raya dan budaya luar. Posisi ini yang pertama terlihat ketika memasuki Kampung Godeireng. Sedangkan *wong wetan* menempati pemukiman yang terletak di belakang dan berada lebih dekat dengan Sungai Code sebelum dibangun *paving block*, perbatasan antara pemukiman penduduk dan Sungai Code adalah tumpukan sampah dan tidak dapat dilewati alat transportasi.

Pemuda yang ada saat ini lebih memiliki kebersamaan, berbeda dengan pemuda dulu yang memiliki prinsip *sopo siro, sopo ingsun*. Usaha harmonisasi ini salah satunya dilakukan oleh Ketua RW 12;

“Jangan mempanjanglebarkan antara *wong kulon* dan *wong wetan* karena kami ke depan akan membangun kawasan Code Selataan yang batas-batas antara kulon dan wetan itu akan luntur.”<sup>17</sup>

Sejalan dengan Ketua RW 12, kelompok pemuda kedua RW justru telah melakukan kegiatan bersama. Pada kelompok pemuda terdapat ruang publik dimana pemuda kedua RW bisa bertemu. Misalnya, dalam kegiatan sanggar seni yang dibangun, kegiatan mushola, dan kegiatan seni lainnya. Seperti yang diungkapkan salah seorang pemuda RW 11, berikut;

“Sentimen kedua RW sudah tidak ada. Hanya ketika masa kecil saya dulu, tapi sejak saya SMP sudah tidak ada. Kami sering mengadakan kegiatan bersama-sama antar pemuda, misalnya kegiatan keislaman, membuat kereta-kereta karnaval. Pemuda yang berpartisipasi merupakan pemuda RW 11 dan RW 12. Kesadaran pemudanya sudah bagus..”<sup>18</sup>

Sejarah konflik yang ada di RW 11 dan 12 berjalan cukup kompleks. Banyak faktor yang memancingnya yakni perbedaan kelas ekonomi,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ketua RW 12, 12 November 2008, pukul 16. 35 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara dengan salah seorang pemuda RW 11, 15 November 2008, pukul 15. 30 WIB.

ajaran agama, *gap* antara golongan tua dan muda bahkan antar partai. Saat ini penduduk kedua RW mencoba meredam konflik tersebut. Dalam hal ini konflik juga memiliki sisi fungsional. Analisis fungsional ini merupakan kritik yang dikemukakan George Ritzer, dalam Teori Sosiologi Modern terhadap teori Dahrendorf yang terlalu mengabaikan ketertiban dan tindakan individu.<sup>19</sup>

Pemikiran awal tentang fungsi konflik sosial berasal dari George Simmel juga diperluas oleh Coser yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar.<sup>20</sup> Dalam suatu masyarakat, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Konflik yang terjadi di masa lalu oleh golongan tua di Godeireng, memotivasi generasi selanjutnya untuk membuat ruang publik dan berperan dalam harmonisasi RW 11 dan RW 12.

Konflik juga membantu fungsi komunikasi bagi pihak-pihak yang termasuk dalam kedua medan yang berkonflik namun pihak-pihak tersebut lepas dari kepentingan medan-medan berkonflik. Contohnya, pemuda kedua RW beraktifitas bersama dalam sebuah sanggar dengan menafikan konflik yang terjadi pada golongan sebelumnya. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai untuk menemukan potensi mereka dan meningkatkan kemungkinan saling mendekati atau saling berdamai. Misalnya, adanya konflik memperjelas perbedaan identitas antara RW 11 dan 12, maka kemudian mereka sadar akan perbaikan dan penataan pemukiman yang sebelumnya kumuh dan tidak tertata. Pendekatan-pendekatan tertentu seperti musyawarah kedua RW dalam sebuah ruang publik untuk pembangunan pasca gempa pun menyatukan keduanya. Musyawarah dilakukan untuk melaksanakan program *Community Development Program (CDP)*. Program ini bertujuan membangun kampung pasca gempa yang didanai lembaga donor asal Jerman. Kedua RW dapat berkumpul bersama karena syarat kepala keluarga (KK) yang melaksanakan pembangunan minimal 300 KK. Sedangkan jumlah KK di masing-masing RW kurang dari 300. Sehingga, mereka harus bergabung.

CDP menjadi salah satu jalan harmonisasi RW 11 dan RW 12. Pembangunan yang melibatkan kedua RW ini mendirikan beberapa fa-

---

<sup>19</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman. (2005), *Teori Sosiologi Modern*, diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Prenada Media. Hlm 158.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.159

silitas fisik bersama. Penentuan pembangunan fasilitas bersama ditentukan beberapa pertimbangan antara lain karena ketersediaan lahan dan tidak yang strategis. Karena bentuk interaksi antar jenis kelamin dan usia yang berbeda-beda, pembangunan fasilitas bersama ini belum dapat digunakan secara optimal oleh kedua RW, hanya RW yang ketempatan saja yang lebih banyak memanfaatkan.

Pada pelaksanaan CDP, hampir semua penduduk dan elemen masyarakat di kedua RW berkumpul. Elemen masyarakat ini terdiri remaja, anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua berbicara tentang impian itu. Warga diminta membuat gambaran tentang harapan kampung di masa depan lalu dibahas dalam perencanaan CDP. Setelah usulan-usulan tentang mimpi masa depan kampung banyak terkumpul, warga mencari usulan mana yang kira-kira banyak diusulkan dan mendesak untuk segera diwujudkan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan musyawarah yang partisipatif. Hasil pembangunan CDP antara lain sanggar kesenian pemuda, balai pertemuan, taman bermain dan *showroom* produk olahan daur ulang sampah. Fasilitas-fasilitas tersebut ada yang telah berjalan optimal sebagai ruang publik antara kedua belah pihak, sementara ada pula fasilitas belum digunakan dengan maksimal.

Hingga saat ini proses harmonisasi membutuhkan suatu proses sosial yang tidak singkat dan yang paling penting adalah adanya partisipasi antara para tokoh yang merupakan bagian dari masyarakat. Adanya konflik juga memiliki fungsi bagi harmonisasi. Partisipasi dari pihak internal sangat dibutuhkan, karena mereka yang mengetahui keadaan sebenarnya.

## **Epilog**

Jika ditinjau dari dinamika konflik yang telah digambarkan di atas, terlihat peran kekuasaan pusat dalam menciptakan konflik dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat pada pembuatan asrama gelandangan oleh pemerintah, pelaksanaan OPK dan kerusuhan pemilu. Pada era kolonial, adanya asrama penampungan kaum miskin penderita lepra mengesankan daerah Godeireng sebagai daerah yang kotor dan miskin. Lalu pada era kemerdekaan muncul kuasa pemerintah untuk menampung para gelandangan di wilayah ini. Akibatnya, dikotomi terjadi antara yang membina dan dibina. Preman yang banyak menempati wilayah kriminal ini

kemudian ditertibkan pemerintah melalui OPK. Mengenai kontrol terhadap konflik oleh struktur, Ralf Dahrendorf, teoritis konflik sosial mengemukakan bahwasanya terdapat pelbagai elemen masyarakat yang menyumbang disintegrasi dan perubahan.<sup>21</sup> Menurut Dahrendorf, keteraturan di masyarakat merupakan hasil pemaksaan yang di atas. Kekuasaan sangat berperan dalam penertiban.

Saat ini masyarakat Godeireng sedang menuju arah harmonisasi meski masih terdapat pelabelan negatif antar kedua pihak. Pembangunan-pembangunan fisik yang telah dilaksanakan sedikit demi sedikit dapat menggerakkan ke arah harmonisasi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik yang diprakarsai oleh warga sendiri, dengan partisipasi warga, serta adanya ruang publik yang memungkinkan kedua pihak untuk bertemu menjadi faktor-faktor pendukung harmonisasi warga.

Penulis mengurutkan konflik dalam kampung ini dari sejarah hubungan sosial kedua RW. Pihak luar berpotensi terhadap dua hal yakni konflik dan harmonisasi. Pihak luar yang tiba-tiba muncul dan melakukan sesuatu tanpa partisipasi dapat menimbulkan kekerasan dan mengancam stabilitas harmonisasi warga. Negara juga berperan dalam penciptaan dan penertiban konflik. Dalam hal ini pemerintah masuk secara tidak partisipatoris, mendirikan panti yang bermuara pada segregasi dan kontrol-kontrol kekerasan pemerintah saat OPK.

Konflik meredam kembali setelah OPK dan ketika dibangun ruang publik. Selain itu, keinginan dari warga untuk mengakhiri konflik dengan meniadakan pelabelan *wong kulon* dan *wong wetan* dapat mendukung harmonisasi. Pihak luar yang masuk melalui pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan partisipatoris juga dapat merangsang harmonisasi. Artinya, faktor waktu juga berperan penting. Pihak luar yang telah beradaptasi secara kekeluargaan cukup lama lebih dimungkinkan sebagai potensi harmonisasi di kedua RW. Sebagai Contohnya, pembangunan CDP yang difasilitasi sebuah LSM. Sebelum pembangunan CDP, LSM ini telah beradaptasi dengan masyarakat sekitar selama beberapa tahun sehingga, dinamika masyarakat dapat teridentifikasi secara rinci. Selain LSM, datangnya seorang warga baru yang beradaptasi juga dapat memprakarsai pengajian untuk upaya peredaman konflik warga. Terdapat pula campur

---

21 *Op, cit*, Ritzer, hlm 153.

tangan dari para aktor untuk menciptakan suatu sistem hubungan sosial yang harmonis, misalnya pengadaan kegiatan bersama, seperti urun rembug dan pengajian. Proses harmonisasi ini akan terus berlanjut jika kedua belah pihak terus memelihara fungsi-fungsi ruang publik yang ada. Pada dasarnya, proses harmonisasi tidak dapat terlaksana tanpa dilandasi keterlibatan seluruh pihak secara partisipatoris, kepercayaan, dan proses artikulasi kepentingan yang adil.

#### **Daftar Pustaka:**

- Dean C. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. (2004). *Teori Konflik Sosial*. alih bahasa Helly p. Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Duverger, Maurice. (2007). *Sosiologi Konflik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauzannafi, Muhammad Zamzam. (2003). Sejarah Institusionalisasi Kampung Tungkak, dalam *Jurnal Kampung Menulis Kota*, edisi *Kota Kampung Kota*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Pondok Rakyat
- Gilbert, Alan, dan Gugler, Josef. (2003). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Alih bahasa Juanda Anshori, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hadi, Syamsul, dkk. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Krausce, Gerald H. (1975). *The Kampung Of Jakarta, Indonesia: Study of spatial pattern in urban poverty*. Pittsburgh: University of Pittsburg.
- Mantra, Ida Bagoes. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. diterjemahkan oleh Alimandan (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Webster, Noah. (1966). *Webster Dictionary*. New York: Random House.